

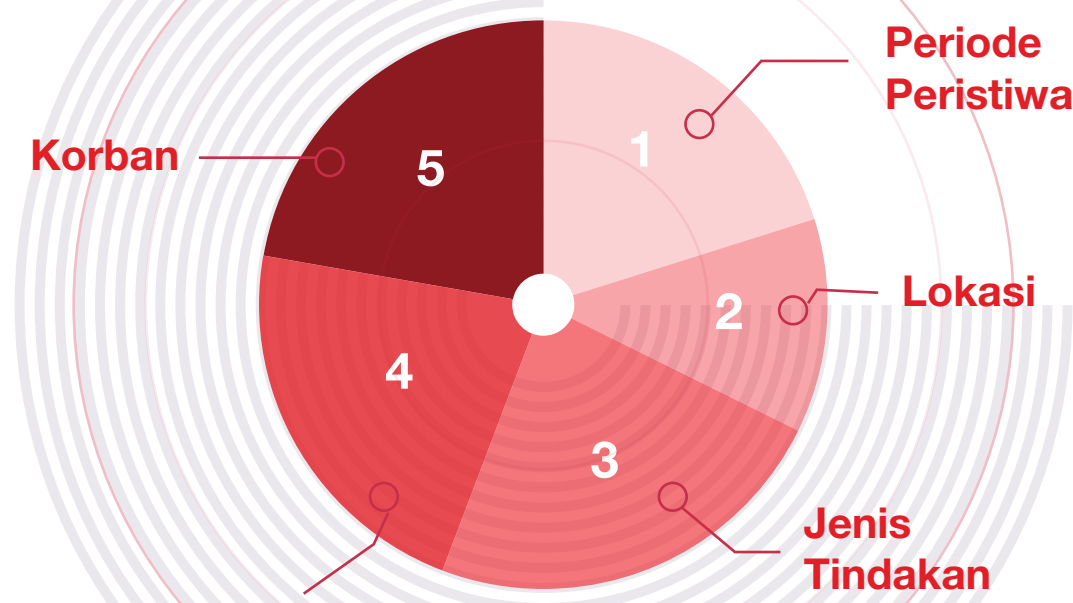
SUDAH TAHU BELUM...

Pada periode tahun ke-3 (2 Juli 2015 - 1 Juli 2016), Koalisi Kebebasan Berserikat [KKB] kembali melakukan pemantauan implementasi UU Ormas melalui media monitoring, penelusuran terhadap adanya peraturan pelaksana atau yang terkait dengan UU Ormas, dan peristiwa atau temuan di lapangan.

TUJUAN PEMANTAUAN:

- Melihat isu-isu terkait kebebasan berserikat
- Melihat peristiwa yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat
- Melihat pola perbandingan yang bertentangan dengan prinsip kebebasan berserikat
- Menjadi data awal untuk mengukur tingkat efektivitas implementasi UU Ormas.

5 Aspek Temuan Yang Menunjukkan Dampak dari Implementasi UU Ormas Tahun ke-3 :



Jumlah peristiwa pemantauan media tahun ke-3 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah peristiwa tahun pertama dan kedua. Pada periode tahun ketiga, terdapat 117 peristiwa dengan 157 jenis tindakan, sedangkan pemantauan media tahun kedua berjumlah 35 peristiwa dengan 39 jenis tindakan dan pemantauan media tahun pertama berjumlah 70 peristiwa dengan 101 jenis tindakan.

TEMUAN PEMANTAUAN MEDIA ONLINE TAHUN KE-3

117
Total Peristiwa
102 Lokal
15 Nasional

PERIODE PERISTIWA

Terdapat **117** peristiwa yang merupakan bentuk implementasi UU Ormas. Tiga peristiwa terbanyak adalah:



Hasil temuan menunjukkan bahwa jumlah peristiwa berbanding lurus dengan jumlah lokasi peristiwa. Secara umum, hasil temuan menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut terjadi di semua tingkatan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.



YUK CARI TAHU HASIL TEMUAN LAINNYA . . .

Jenis Tindakan

Melalui hasil pemantauan implementasi UU Ormas, terdapat 7 kategori jenis tindakan:



Peningkatan terbesar terlihat pada kategori kewajiban mendaftar dengan selisih **36** tindakan (53 tindakan pada periode ketiga dan 17 tindakan pada periode kedua)

Pelaku



DPR/DPRD
8 peristiwa

PIMPINAN ORMAS
4 peristiwa

APARAT HUKUM
3 peristiwa

**KEMENKUMHAM,
KEMENKOPOLHUKAM,
DAN PPATK**
1 peristiwa

Siapa Saja Sih Korbannya???

Ormas yang dianggap sesat/anti Pancasila

Ormas dengan SKT bermasalah

Ormas tak ber-SKT

Ormas tak berbadan hukum

Ormas asing

Ormas LGBT

Ormas radikal

SIMPULAN HASIL TEMUAN IMPLEMENTASI UU ORMAS

Temuan dengan frekuensi paling dominan sejak semester pertama:

Kebijakan kepemilikan dan perpanjangan SKT

1 Permintaan kepada Ormas untuk mendaftar, termasuk memperbarui keberlakuan SKT, hampir selalu diikuti dengan sebuah konsekuensi kebijakan, seperti persyaratan bagi Ormas yang ingin mendapatkan (fasilitas) pelayanan dan dana hibah/bantuan sosial (bansos).

2 Tidak hanya di level (konsekuensi) kebijakan, Ormas yang tidak memiliki SKT oleh otoritas formal diposisikan hingga beratribut - tidak jelas, ilegal, dan akan ditertibkan, atau dengan bahasa lain **dibekukan**



INSTRUMEN PEMERINTAH UNTUK MENDATA PROFIL ORMAS



ANALISA TENTANG TEMUAN HASIL IMPLEMENTASI UU ORMAS TAHUN KE-3